

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah agenda bersama yang dibuat oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah merumuskan 17 tujuan global SDGs yang akan dicapai untuk SDGs Indonesia menuju 2030, salah satunya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Sukirno (2011) pertumbuhan ekonomi merupakan berkembangnya kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat dan diiringi dengan kesejahteraan masyarakatnya yang juga meningkat. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan pembangunan ekonomi pun semakin baik. Oleh karena itu setiap negara melalui SDG's berusaha untuk dapat mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya (Rizkianda, 2022). Berdasarkan karya-karya Schumpeter (1912), Shaw (1973), dan McKinnon (1970) sektor keuangan merupakan salah satu fundamental dalam menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi. Dalam Distribusi sumber daya langka yang tersedia dalam suatu perekonomian, sektor keuangan memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang terjangkau, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada prespektif teoretis tersebut diyakini bahwa inklusi keuangan adalah kekuatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

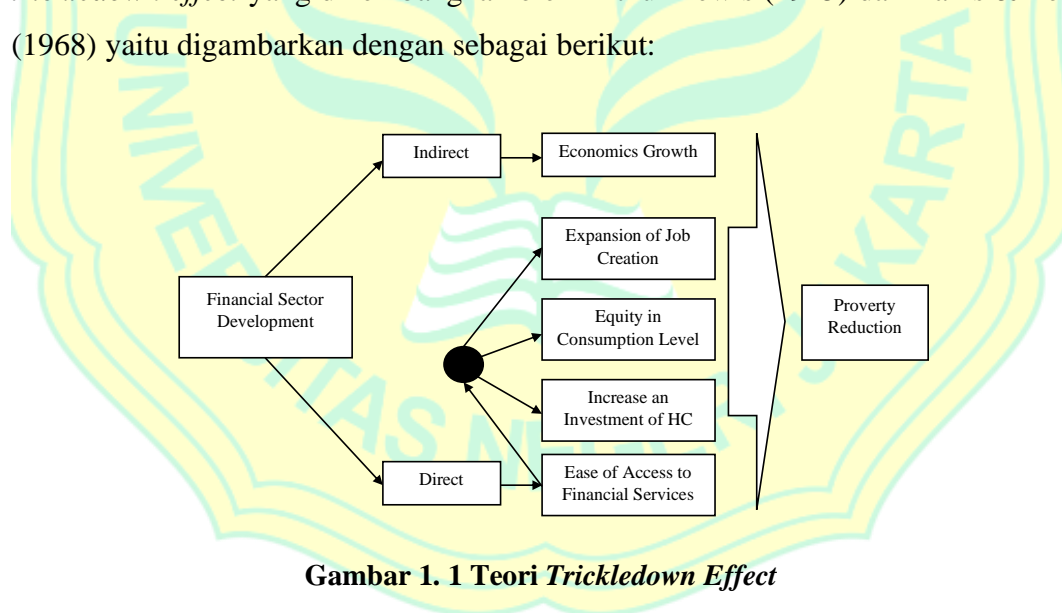
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014) inklusi keuangan (*financial inclusion*) merupakan seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Dalam hal ini sektor keuangan khususnya perbankan memainkan peranan penting melalui fungsi intermediasinya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Levine (2005) terdapat empat peran sektor keuangan yang bermanfaat bagi perekonomian, yaitu mampu menurunkan resiko, memobilisasi tabungan, menurunkan biaya transaksi dan informasi, dan mendorong terjadinya spesialisasi. Melalui peran tersebut sektor keuangan mampu menciptakan akumulasi modal dan inovasi teknologi yang selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada fakta yang dapat dirasakan pada saat ini bahwa peran sektor keuangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang penduduknya masih dalam kategori *unbanked* atau belum terjangkau sektor keuangan formal, hal tersebut menyebabkan Indonesia secara ekonomi penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan dan rentan akan terkena dampak gejolak ekonomi. Menurut laporan dari SEA (2019) dalam kajian keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2020 memperkirakan bahwa di Indonesia yang masyarakatnya masuk ke dalam kategori *unbanked* adalah mencapai 92 juta penduduk atau sekitar 34,1% dari total seluruh populasi masyarakat yang ada di Indonesia. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia dan Thailand dengan masing-masing total masyarakat pada kategori *unbanked*-nya adalah sebesar 3 juta (9,2%) dan 10 juta(14,5%) penduduk.

Untuk itu pada tanggal 1 September 2016 Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Presiden

No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau disingkat dengan SNKI, dengan adanya Perpres SNKI ini diharapkan dapat mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan dapat digunakan untuk menjadi pedoman langkah-langkah strategis bagi Kementerian/Lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan ekonomi antar individu ataupun antar daerah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Indonesia telah menjadikan keuangan inklusif (*financial inclusion*) menjadi salah satu strategi nasional yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan kemiskinan, distribusi pendapatan yang merata dan stabilitas sistem keuangan (Hartati, 2017). Dengan adanya pembangunan dalam sektor keuangan maka pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu sendiri. Hal tersebut juga sesuai dengan teori *trickledown effect* yang dikembangkan oleh Arthur Lewis (1945) dan Ranis & Fei (1968) yaitu digambarkan dengan sebagai berikut:



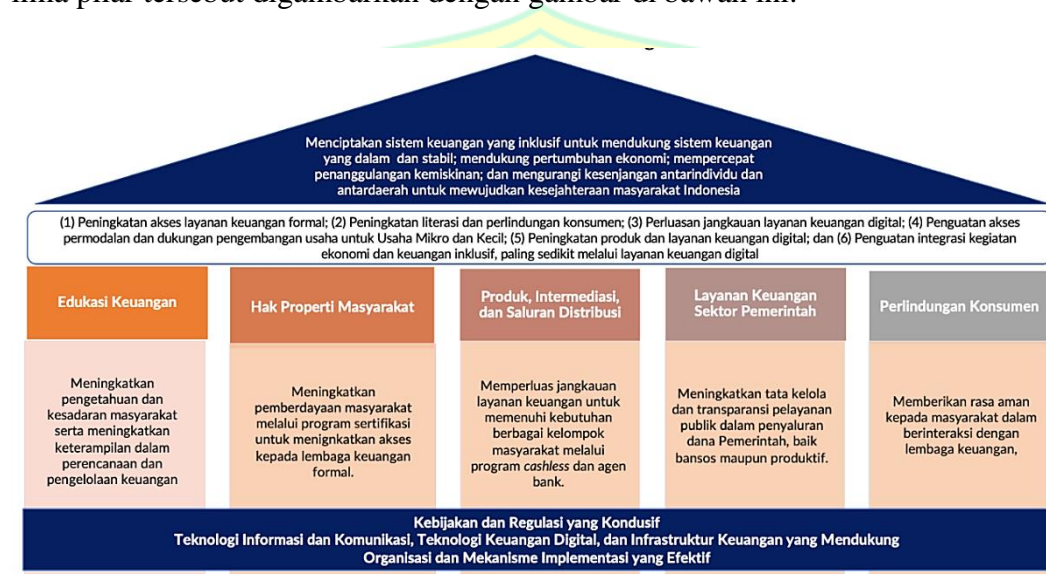
Gambar 1. 1 Teori *Trickledown Effect*

Sumber: Arthur Lewis (1945) dan Ranis & Fei (1968)

Dapat diketahui dari gambar 1.1 di atas bahwa teori *trickledown effect* atau bisa disebut dengan “efek menetes kebawah” adalah teori yang menjelaskan bahwa pembangunan pada sektor keuangan secara tidak langsung akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dengan secara langsung mendorong perluasan

lapangan pekerjaan, meningkatkan tingkat konsumsi, mendorong pertumbuhan investasi sumber daya manusia, dan memudahkan akses layanan keuangan.

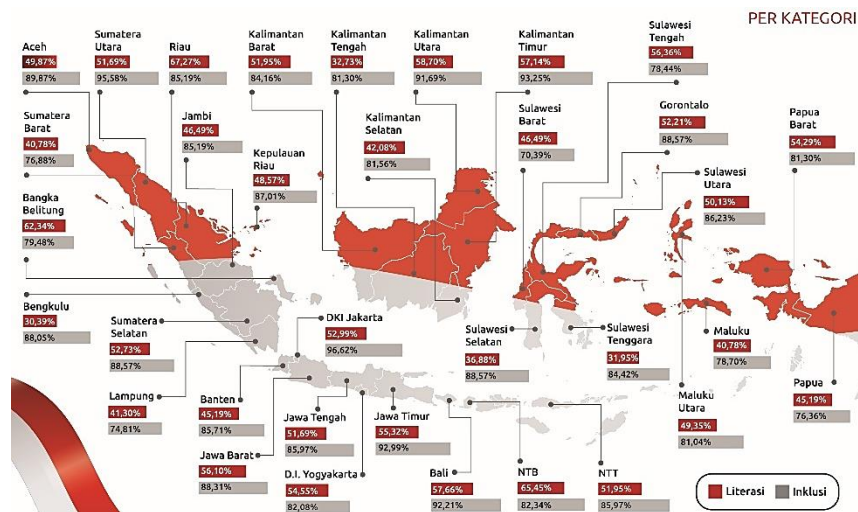
SNKI dibentuk berdasarkan lima pilar utama yang meliputi edukasi keuangan; hak property masyarakat; produk, intermediasi, dan saluran distribusi; layanan keuangan sektor pemerintahan; dan perlindungan konsumen. Sebagaimana lima pilar tersebut digambarkan dengan gambar di bawah ini.



Gambar 1. 2 Lima Pilar SNKI

Sumber: Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2016

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) disusun dalam rangka untuk menciptakan inklusi keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan adanya Strategi ini angka indeks inklusi keuangan meningkat pesat sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada di berikut ini



Gambar 1. 3 Indeks Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan di Indonesia

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 indeks inklusi keuangan naik sebesar 85,10% dibandingkan dengan sebelumnya yaitu di tahun 2019 sebesar 76,19% dengan Provinsi DKI Jakarta yang menyumbang inklusi keuangan paling tinggi yaitu sebesar 96,62% dan paling rendah pada Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebesar 70,39%. Dari data tersebut pula dapat diketahui bahwa masih adanya kesenjangan antar Provinsi di Indonesia, sehingga kajian mengenai kebijakan inklusi keuangan yang mampu mendorong stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Sarma (2012) menyatakan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kondisi inklusi keuangan di suatu wilayah, yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, penggunaan jasa perbankan. Indikator perbankan digunakan untuk melihat kondisi inklusi keuangan suatu wilayah dikarenakan sub sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki peran paling besar di dalam sektor keuangan formal dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Dimensi penetrasi perbankan (*accessibility*) menunjukkan sejauh mana masyarakat pada suatu wilayah telah mengakses jasa perbankan. Kepemilikan akun bank menjadi indikator yang menggambarkan masyarakat telah mengakses jasa perbankan. Kedua, dimensi ketersediaan jasa perbankan (*availability*) berkaitan

dengan infrastruktur layanan perbankan yang tersedia bagi masyarakat. Untuk melihat dimensi ketersediaan jasa perbankan indikator yang digunakan adalah jumlah kantor bank yang tersedia pada suatu wilayah. Sedangkan, dimensi penggunaan jasa perbankan (*usage*) berfungsi untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memanfaatkan layanan jasa perbankan. Indikator yang digunakan dalam dimensi penggunaan layanan keuangan adalah jumlah tabungan dan kredit perbankan pada suatu wilayah.

Pada tahun 2021, World Bank merilis kondisi indikator-indikator utama inklusi keuangan diberbagai negara termasuk Indonesia. Indikator yang digunakan adalah rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki akun bank, rasio 4 penduduk usia 15 tahun ke atas yang menabung di lembaga keuangan formal, serta rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang meminjam di lembaga keuangan formal.

Tabel 1. 1 Indikator Utama Inklusi Keuangan Beberapa Negara ASEAN Tahun 2021

No	Indikator	Kepemilikan Akun (Age 15+)	Formal Savings (Age 15+)	Formal Borrowing (Age 15+)
1	Indonesia	51%	20%	13%
2	Malaysia	88%	47%	13%
3	Singapura	97%	60%	43%
4	Thailand	94%	52%	28%
5	Filiphina	46%	19%	17%

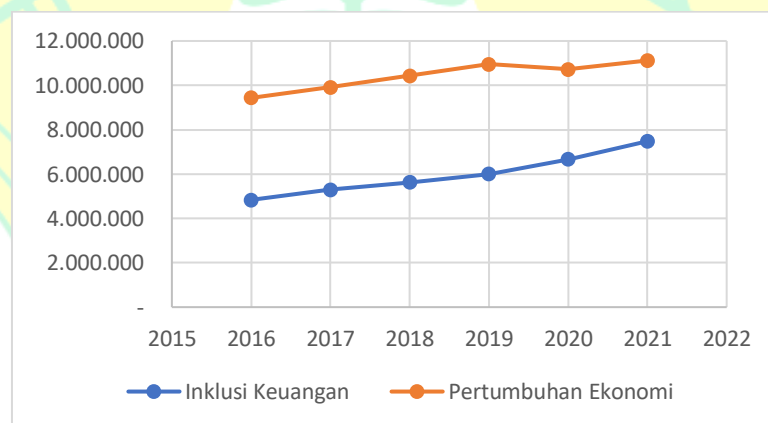
Sumber: World Bank, 2021

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa indikator utama inklusi keuangan Indonesia ditahun 2021 masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bila dilihat penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia yang telah memiliki akun bank hanya sebesar 51%. Selain itu, dari segi penggunaan layanan perbankan juga masih rendah, tingkat penduduk usia 15 tahun ke atas yang menyimpan dana di bank hanya 20%, bahkan dari sisi kredit perbankan lebih rendah hanya sebesar 13%. Hal tersebut menunjukkan masih banyak

penduduk usia 15 tahun ke atas atau usia kerja di Indonesia yang belum terjangkau dan menggunakan layanan jasa keuangan perbankan.

Menurut Bank Indonesia (2014), beberapa faktor penyebab rendahnya inklusi keuangan di Indonesia, yaitu dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Di sisi penawaran, informasi yang tidak seimbang menyebabkan institusi keuangan memilih pelanggan dengan terlalu ketat, yang mengakibatkan peningkatan lima biaya operasional di daerah-daerah terpencil. Selain itu, lembaga keuangan percaya bahwa pelayanan rumah tangga berpendapatan rendah tidak menguntungkan, dan mereka tidak tahu tentang kebutuhan rumah tangga berpendapatan rendah, yang mengakibatkan desain produk yang tidak sesuai. Dalam hal permintaan, faktor-faktor ini termasuk pendapatan rumah tangga yang terlalu rendah, persyaratan administrasi yang terlalu rumit, lokasi kantor yang tidak terjangkau, kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang rendah, dan gagasan bahwa bank hanya untuk orang kaya.

Rendahnya masyarakat yang mengakses jasa perbankan dan belum meratanya jumlah kantor bank yang tersedia juga diikuti dengan rendahnya dana masyarakat yang terhimpun yang disalurkan oleh bank. Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan dana pihak ketiga (DPK) dibandingkan dengan PDRB di Indonesia pada tahun 2016-2021.



Gambar 1. 4 Proporsi Pertumbuhan DPK terhadap PDRB di Indonesia Tahun 2016-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia diolah, 2021

Dari gambar 1.4 dapat diketahui bahwa untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2016 ke tahun 2021 naik sebesar Rp 2.642.531 Milyar Rupiah atau sebesar 54,63% yang sebelumnya pada tahun 2016 sejumlah 4.836.932 Milyar Rupiah kemudian menjadi 7.479.463 Milyar Rupiah, dan untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2016 ke tahun 2021 naik sebesar 1.685.465 Milyar Rupiah atau sebesar 17,86% yang sebelumnya pada tahun 2016 sejumlah 9.434.613 Milyar Rupiah kemudian menjadi 11.120.078 Milyar Rupiah. Naiknya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto dari tahun ketahun secara konsisten menunjukkan bahwa terdapat potensi besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa negara Indonesia memiliki cukup potensi untuk mencapai tujuan dari SDGs yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa studi empiris telah menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya Kumar Lenka dan Ruchi Sharma pada Sharma (2016) yang menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di India, penelitian lainnya juga dilakukan oleh Dai Won Kim, Jung Suk Yu, dan M. Kabir Hasan (2018) yang menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara OKI.

Sedangkan, penelitian yang membahas terkait hubungan antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih jarang ditemukan, untuk itu penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi melalui sektor keuangan yaitu inklusi keuangan menjadi hal menarik untuk dilakukan. Maka penelitian ini ditulis untuk mengetahui hubungan kausalitas yang terjadi antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan judul “Analisis Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2016-2022”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Melalui latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi inklusi keuangan di Indonesia Tahun 2016-2022?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 2016-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dipaparkan, oleh karena itu tujuan penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi inklusi keuangan di Indonesia Tahun 2016-2022
2. Menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 2016-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai analisis inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya ekonomi moneter dan menjadi landasan bagi peneliti lain saat melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan memberi gambaran penulis terkait inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah informasi dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di luar Universitas Negeri

Jakarta mengenai analisis inklusi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi

c. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait sebagai bahan tinjauan dalam menentukan kebijakan strategis terkait peningkatan akses dan penggunaan jasa keuangan terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

